



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

PBNU Sebagai Mediator dalam Proses Penyelesaian
Konflik di Afghanistan

Skripsi

Oleh

Refsy Remas Nurharbi

2016330086

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

PBNU Sebagai Mediator dalam Proses Penyelesaian
Konflik di Afghanistan

Skripsi

Oleh

Refsy Remas Nurharbi

2016330086

Pembimbing

Idil Syawfi S.IP., M.Si

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Refsy Remas Nurharbi
Nomor Pokok : 2016330086
Judul : PBNU Sebagai Mediator dalam Proses Penyelesaian Konflik di Afghanistan

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 26 Januari 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. I Nyoman Sudira

: 

Sekretaris

I'dil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

Anggota

Vrameswari Omega W., .SIP., M.Si.(Han)

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Refsy Remas Nurharbi

NPM : 2016330086

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : PBNU sebagai Mediator dalam Proses
Penyelesaian Konflik di Afghanistan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Kuningan, 13 Januari 2021



Refsy Remas Nurharbi
2016330086

ABSTRAK

Nama : Refsy Remas Nurharbi
NPM : 2016330086
Judul Skripsi : PBNU Sebagai Mediator dalam Proses Penyelesaian Konflik di Afghanistan

Konflik antara Afghanistan dan Taliban berlangsung selama kurang lebih dua dekade. Pada tahun 2011, PBNU menjalankan misinya untuk menjadi mediator dalam resolusi konflik di Afghanistan. Melalui pendekatan yang berbeda dari mediator yang pernah mencoba untuk menjadi penengah dalam konflik Afghanistan, PBNU memakai pendekatan agama Islam dan mendapat kepercayaan penuh dari pihak Afghanistan dan Taliban sebagai mediator yang netral. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai faktor apa saja yang menjadikan PBNU sebagai mediator dalam mendorong terealisasinya perdamaian di Afghanistan atas konflik yang terjadi dengan Taliban. Dari peristiwa tersebut maka dibuat rumusan penelitian yakni **“Apa faktor yang membuat PBNU menjadi mediator dari resolusi konflik di Afghanistan?”**. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut penulis menggunakan konsep peran agama dalam resolusi konflik oleh aktor berbasis keyakinan/*faith-based actor* dan resolusi konflik milik James A. Schellenberg. Dalam menunjang penelitian ini penulis akan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dirumuskan lima kesimpulan. Pertama, peran potensial yang dimiliki oleh PBNU sebagai mediator di Afghanistan berasal dari legitimasi dan kredibilitas PBNU yang didapatkan dari pendekatan agama Islam melalui peran ulama sebagai pihak yang netral, dihormati, dan dipercaya oleh Afghanistan dan Taliban. Kredibilitas dari PBNU juga didapatkan dari peranan K.H As’ad Said Ali sebagai ketua pelaksana resolusi konflik Afghanistan. Kedua, PBNU memiliki kapabilitas sebagai mediator dan mendukung keberlanjutan perdamaian yang direalisasikan melalui pemberian dana hibah dari Pemerintah Indonesia melalui PBNU untuk pembangunan *Indonesia Islamic Centre* sebagai bagian dari lembaga, dan ketersediaan ulama Indonesia di Afghanistan. Ketiga, karakteristik proses mediasi oleh PBNU melibatkan identitas spiritual dari nilai-nilai agama Islam seperti *Tawasuth*, *Tawazun*, dan *Tasamuh* yang diimplementasikan sebagai model resolusi konflik yang dinamakan Islam Nusantara. Keempat, PBNU menggunakan dalil-dalil yang bersumber dari ayat suci Al-Quran sebagai karakteristik dalam model resolusi konflik yang dinamakan Islam Nusantara dan dalam proses dialog damai. Kelima, karakteristik PBNU dalam melakukan resolusi konflik di Afghanistan adalah menggunakan ritual keagamaan sebagai sarana untuk membentuk identitas bersama antara pihak-pihak yang berkonflik, nilai-nilai Islam tersebut yakni *Rahmatan lil ‘alamin*, *Ukhuwah islamiyah*, *Ukhuwah Wathoniyah*, dan *Ukhuwah Basyariyah*.

Kata Kunci: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Resolusi konflik, Afghanistan, Taliban, Mediator, Islam Nusantara.

ABSTRACT

Name : Refsy Remas Nurharbi
Student ID : 2016330086
Thesis Title : *PBNU As Mediator of Conflict Resolution in Afghanistan*

The conflict between Afghanistan and the Taliban lasts for more than two decades. In 2011, the PBNU conducting its mission to become a mediator in conflict resolution in Afghanistan. Through a different approach from the mediators who have done to mediate in the Afghanistan conflict, PBNU adopts an Islamic religious approach and has the full trust of both the Afghan and the Taliban as a neutral mediator. This study aims to identify the factors that make PBNU a mediator in encouraging the realization of peace in Afghanistan over the conflict that occurred with the Taliban. From this case, a research formula was made, "What are the factors that made PBNU a mediator of conflict resolution in Afghanistan?" To answer the research question, the writer used the concept of the role of religion in conflict resolution by faith-based actors and Conflict resolution by James A. Schellenberg. In conducting this research the writer will use qualitative methods through literature study and interviews. From the results of the analysis that has been done, five conclusions can be formulated. First, the potential role that the PBNU has as a mediator in Afghanistan comes from the legitimacy and credibility of the PBNU derived from the Islamic religious approach through the role of the ulama as neutral, respected and trusted by Afghanistan and the Taliban. The credibility of the PBNU is also derived from the role of K.H As'ad Said Ali as the leader in Afghanistan conflict resolution. Second, PBNU has the capability of being a mediator and supporting the sustainability of peace which is realized through the provision of grant funds from the Government of Indonesia through the PBNU for the development of the Indonesia Islamic Center as part of the institution, and the availability of Indonesian scholars in Afghanistan. Third, the characteristics of the mediation process by PBNU involve the spiritual identity of Islamic religious values such as Tawasuth, Tawazun, and Tasamuh which are implemented as conflict resolution models called Islam Nusantara. Fourth, the PBNU uses arguments derived from the holy Quran as characteristics in a conflict resolution model called Islam Nusantara and in the process of peaceful dialogue. Fifth, the characteristic of the PBNU in conducting conflict resolution in Afghanistan is that using religious rituals as a means of forming a collective identity between conflicting parties. Islamic values as a collective identity that are implemented are Rahmatan lil 'alamin, Ukhuwah islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah, and Ukhuwah Basyariyah.

Keywords: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Conflict resolution, Afghanistan, Taliban, Mediator, Islam Nusantara.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang atas bimbingannya dapat memberikan kelancaran untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2021. Skripsi yang berjudul *PBNU Sebagai Mediator dalam Proses Penyelesaian Konflik di Afghanistan* merupakan analisis penulis atas faktor-faktor yang melatarbelakangi PBNU sebagai mediator konflik di Afghanistan dengan Taliban. Penulis harap penelitian ini dapat menjadikan bahan referensi bagi pembaca yang ingin memahami mengenai PBNU sebagai mediator konflik di Afghanistan yang menggunakan peranan agama dalam mediasi perdamaian konflik Afghanistan.

Penulis menyadari penelitian ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada Mas Idil Syawfi S.IP., M.Si selaku pembimbing penulis dalam merancang penelitian ini atas solusi dan saran yang telah diberikan. Terimakasih juga bagi pihak keluarga dan teman terdekat yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sebagai penutup, penulis mohon maaf apabila masih adanya kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini, penulis berharap penelitian ini memberikan pemahaman baru bagi pihak yang memerlukan.

Kuningan, 31 Januari 2021

Refsy Remas Nurharbi

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan kerendahan hati yang tulus, penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada:

Allah SWT yang telah melindungi serta memberi kekuatan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi. Atas anugerah serta bimbingan-Nya penulis bisa mencapai akhir masa perkuliahan ini. Semoga penelitian ini menjadi berkah bagi penulis dan pihak-pihak yang memerlukan.

Diri sendiri yang telah kuat bertahan menerjang segala tangis serta usaha dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mama, Papa, Kakak kandung; Teh Pepi yang telah memberikan dukungan secara moral dan finansial kepada penulis selama masa perkuliahan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.

Mas Idil Syawfi selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak saran dan kritik membangun selama proses penelitian hingga terselesaikannya penelitian ini, semoga ilmu yang Mas berikan kepada penulis dan mahasiswa/i lain senantiasa menjadi berkah.

Mas I Nyoman Sudira dan Mba Vrameswari selaku dosen penguji penelitian penulis yang telah memberikan banyak pemahaman dan saran baru untuk menyempurnakan penelitian penulis.

Seluruh Dosen dan staff Tata Usaha FISIP UNPAR yang telah membantu dan memberikan pelajaran berharga dari semester awal hingga akhir perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.

Bapak KH. As'ad Said Ali selaku narasumber utama yang telah memberikan jutaan informasi serta data primer sehingga penulis bisa menjalankan dan menyelesaikan penelitian ini.

Gus Zaky dan *Gus Zaim* selaku anggota GP Ansor yang telah memberikan ide dalam pembuatan topik skripsi ini serta mempertemukan penulis dengan narasumber utama yakni KH. As'ad Said Ali dalam melakukan wawancara untuk menyelesaikan penelitian ini.

Meitania Putri Maharani sebagai teman yang sangat suportif dan paling berjasa dalam memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Teman special, Tz yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah dan tangis penulis dalam melewati kerasnya kehidupan.

Teman-teman HI 2016 yang telah menemani hari-hari penulis semasa masa kuliah.

Kuningan, kota dimana tempat penulis menyelesaikan skripsi dan belajar hidup mandiri, serta *Bandung* kota yang penuh misteri dan memberikan warna bagi kehidupan penulis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR AKRONIM.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	7
1.2.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kajian Pustaka	9
1.5 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.6.1 Metode Penelitian	19
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	19
1.7 Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II Proses Penyelesaian Konflik di Afghanistan.....	22
2.1 Akar Permasalahan di Afghanistan.....	23
2.2 Peran PBNU Dalam Proses Perdamaian di Afghanistan	25

2.2.1. Upaya PBNU Dalam Membantu Perdamaian.....	27
2.2.2. Dialog-Dialog Perdamaian	29
2.3 Pembentukan NU Afghanistan dan Pengenalan Islam Nusantara	34
2.3.1 Penyelesaian Konflik dengan Islam Nusantara.....	36
2.4 Dukungan dan Apresiasi Pemerintah Indonesia Kepada PBNU di Afghanistan	40
2.4.1. Bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dan Afghanistan.....	40
2.4.2. Apresiasi dan Dukungan Pemerintah Indonesia.....	43
BAB III PBNU Sebagai Aktor Berbasis Keyakinan dalam Proses Resolusi Konflik Afghanistan dan Taliban	46
3.1 PBNU Sebagai Mediator Konflik di Afghanistan.....	46
3.2 Peran Potensial PBNU di Afghanistan.....	49
3.2.1 Legitimasi dan Kredibilitas PBNU sebagai Pihak Penengah Konflik Afghanistan dan Taliban.....	50
3.2.2 Kapabilitas PBNU dalam Mendukung Keberlanjutan Perdamaian di Afghanistan.....	56
3.3 Karakter PBNU dalam Menjalankan Perannya sebagai Mediator Konflik di Afghanistan	61
3.3.1 Pengimplementasian Nilai-nilai Spiritualitas dari Agama Islam dan Islam Nusantara sebagai Model Resolusi Konflik dengan Afghanistan	62
3.3.2 Pendekatan Resolusi Konflik oleh PBNU dengan Menggunakan Kitab Suci Al-Quran	69
3.3.3 Usaha PBNU untuk Melakukan Pendekatan Resolusi Konflik dengan Menggunakan Ritual Keagamaan dalam Konflik Afghanistan.....	71
BAB IV KESIMPULAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Linimasa PBNU sebagai Mediator dalam Proses Perdamaian di Afghanistan.....	34
Gambar 2. 2 Nilai-nilai Islam Nusantara	38
Gambar 3.2 Masjid As-Salam yang Menjadi Bagian dari IIC di Kabul.....	58

DAFTAR AKRONIM

BDF	<i>Bali Democracy Forum</i>
BIN	Badan Intelijen Negara
CSO	<i>Civil Society Organization</i>
ICIS	<i>International Conference of Islamic Scholars</i>
ICRC	International Committee of the Red Cross
IIC	<i>Indonesian Islamic Center</i>
Keppres	Keputusan Presiden
MoU	<i>Memorandum of understanding</i>
NATO	<i>The North Atlantic Treaty Organization</i>
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i>
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NUA	Nahdlatul Ulama Afghanistan
NUI	Nahdlatul Ulama Indonesia
OIC	<i>Organisation of Islamic Cooperation</i>
PBNU	Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
UNSC	<i>United Nations Security Council</i>
UUD 1945	Undang-undang Dasar 1945

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kudeta yang terjadi pada tahun 1978 pada Presiden Afghanistan yakni Sardar Mohammed Daoud yang berasal dari Partai Revolusi Nasional Afghanistan menjadikannya suatu peristiwa masif atas perubahan politik, sosial, budaya, dan ekonomi bagi Afghanistan. Kudeta yang sukses dilakukan oleh Partai Demokratis Rakyat Afghanistan yang merupakan partai berideologi komunis kemudian menjadi katalis akan adanya invasi oleh Uni Soviet yang terjadi setahun setelah peristiwa kudeta pada tahun 1978.¹

Setahun kemudian kehadiran Taliban dimulai saat Afghanistan di invasi oleh Uni Soviet pada tahun 1979, pada masa itu Uni Soviet berhasil menggulingkan kepemimpinan Hafizullah Amin sebagai pesaing dari kekuasaan komunis di Afghanistan.² Di tahun 1980, terdapat adanya konfrontasi yang berujung oleh kekerasan antara warga Afghanistan dengan pemerintahan dari Partai Demokratis Rakyat Afghanistan yang disebabkan oleh penegakan ideologi sosialisme di negara tersebut. Konfrontasi antara reformasi yang dibawa oleh Partai Demokratis Rakyat yang berideologi komunis dianggap tidak berkesesuaian dengan politik tradisional

¹ Odd Arne Westad, "Prelude to Invasion: The Soviet Union and the Afghan Communists, 1978-1979," *The International History Review* 16. No.1 (1994): pp. 49-69, diakses pada 19 November, 2020, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07075332.1994.9640668>.

² Human Rights Watch Report, "Reports Afghanistan." Diakses pada 18 Agustus 2020, <https://www.hrw.org/reports/1991/afghanistan/2AFGHAN.htm>

Afghanistan.³ Lebih dari tujuh juta warga Afghanistan terpaksa untuk mengungsi ke negara lain, selain itu dengan adanya invasi dari Uni Soviet membawa Afghanistan terhadap kehancuran pada ekonomi negara tersebut yang berorientasi di ekonomi swasembada terutama di bidang pertanian menjadikan negara tersebut bergantung pada bantuan internasional.⁴

Dibawah pimpinan Babrak Kamal yakni politisi Afghanistan yang didukung oleh Uni Soviet memimpin perang antara Soviet dan Afghanistan hingga tahun 1988, Afghanistan yang didukung oleh komunitas internasional seperti Amerika Serikat, Pakistan, Tiongkok, Iran, dan Saudi Arabia kepada Mujahidin berujung penarikan pasukan Soviet yang dipimpin oleh Mikhael Gorbachev.⁵ Situasi tersebut menjadikan Afghanistan tempat untuk mencari kombatan oleh Mujahidin yang anti-Soviet dan kaum radikal lainnya yang mempunyai tujuan untuk melawan kaum muslim moderat saat Uni Soviet meninggalkan Afghanistan.⁶

Adanya permukiman untuk perekrutan kombatan tersebut menarik perhatian bagi kaum radikal yang terdapat di belahan dunia lain seperti Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tenggara yang memunculkan sebuah gerakan Taliban (Mahasiswa) pada tahun 1994 yang dipimpin oleh Mullah Omar yang berasal dari gerakan Mujahidin. Setelah peninggalan Uni Soviet dari Afghanistan, negara tersebut terlibat dalam bentrokan antar etnis selama bertahun-tahun.

³ Neamatollah Nojumi, *The Rise of the Taliban in Afghanistan: Mass Mobilization, Civil War, and the Future of the Region* (Basingstoke: Palgrave, 2002), Hal X.

⁴ Ibid.

⁵ BBC, "Afghanistan Profile - Timeline," (BBC, September 9, 2019), diakses pada 19 November, 2020, <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12024253>.

⁶ William Maley, *Rescuing Afghanistan*, London: Hurst, 2006, Hal 21.

Daerah Pashthun yang terletak di Pakistan dan Afghanistan yang dikenal sebagai daerah berkembangnya gerakan Taliban mempunyai rencana untuk melakukan pemulihan perdamaian, keamanan, dan menegakkan hukum Islam Syariah sendiri saat mereka berkuasa.⁷ Taliban mulai memperluas pengaruhnya dengan mengambil kontrol atau menduduki beberapa daerah dari rentang tahun 1995 hingga 1998, daerah provinsi Herat yang berbatasan dengan Iran dan daerah Kabul merupakan daerah yang berada dalam kontrol Taliban. Hingga 1998, daerah kekuasaan Taliban hampir mencakup 90% dari Afghanistan.⁸ Afghanistan dan Taliban berkonflik untuk waktu yang cukup lama dan berpotensi untuk mendestabilkan negara tersebut, hingga saat ini Afghanistan dan aktor internasional secara berkala mengenali serangan yang dilakukan oleh Taliban dan berupaya untuk mengakomodasi adanya pertemuan antara Afghanistan dan Taliban.⁹

Perang selama tiga dekade terakhir memberikan dampak yang buruk di Afghanistan, jutaan warga sipil terbunuh dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi, serta hancurnya infrastruktur yang ada di negara tersebut, diikuti oleh tatanan negara yang rapuh.¹⁰ Afghanistan merupakan tempat bagi adanya konflik bersenjata yang berlarut-larut antara operasi militer internasional, permusuhan antar etnis,

⁷ Shanthie Mariet D'Souza, "Taliban: The Rebels Who Aspire to Be Rulers," *Journal of Asian Security and International Affairs* 3, no. 1 (September 2016): pp. 20-40, diakses pada 18 Agustus 2020, <https://doi.org/10.1177/2347797015626043>, Hal 21.

⁸ Ibid.

⁹ Conciliation Resources, "Processing Peace in Afghanistan." Diakses pada 18 Agustus 2020, <https://rc-services-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/Processing%20peace%20in%20Afghanistan.pdf>. Hal 7.

¹⁰ Oxfam International, "The Cost of War: Afghan Experiences of Conflict, 1978-2009." 2009, diakses pada 19 Agustus 2020, https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/afghanistan-the-cost-of-war_14.pdf, Hal 3.

fragmentasi sosial, dan tingkat kemiskinan yang menciptakan adanya kekerasan secara sistemik.¹¹

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan adanya kondisi tersebut maka penyelesaian secara politik untuk mengakhiri perang di Afghanistan telah menjadi perhatian aktor internasional dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya dengan memulai membuka pembicaraan bersama pimpinan Taliban secara langsung.¹² Untuk memulai pembicaraan damai, maka mitra internasional Afghanistan harus mempertimbangkan beberapa hal seperti kepentingan pihak mediator dan penyusunan agenda. Penggunaan pasukan militer untuk memulai pembicaraan damai pun harus diminimalisir untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.¹³

Mencapai perdamaian di Afghanistan merupakan proses yang panjang dan sulit, adanya ketegangan antara Pakistan sebagai negara yang berbatasan dengan Afghanistan diindikasikan telah membantu mendanai kegiatan operasi bagi kelompok pemberontak di perbatasan Pakistan memperburuk keadaan damai.¹⁴ Peran komunitas internasional seperti NATO, UNSC, dan Uni Eropa yang

¹¹ Harvard Humanitarian Initiative, "Fragile Future: The human cost of conflict in Afghanistan." 2018, diakses pada 19 Agustus 2020, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SSRN-id3291982.pdf> Hal 6.

¹² United States Institute of Peace, "Making Peace in Afghanistan: The Missing Political Strategy." Special Report, Februari 2011, diakses pada 19 Agustus 2020, <https://www.usip.org/sites/default/files/SR267Jarvenpaa.pdf>. Hal 5.

¹³ Ibid.

¹⁴ CSS ETH Zurich, "The Difficult Stabilization of Afghanistan." CSS Analyses in Security Policy No.11, diakses pada 19 Agustus 2020, https://www.files.ethz.ch/isn/30405/css_analysen_nr11-0407_e.pdf Hal 3.

menurunkan penggunaan militer dan instrumen sipil lainnya pun kurang mendapat kepercayaan dan kredibilitas bagi warga Afghanistan untuk dapat menstabilkan kembali negara tersebut. Hal tersebut dikarenakan banyaknya korban jiwa yang jatuh saat adanya operasi militer oleh pasukan asing, dan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia di pangkalan militer asing.¹⁵

Maka dari itu perlu hadir aktor lain yang mempunyai legitimasi dan kredibilitas dan dipercayai oleh kedua belah pihak untuk menjalankan proses negoisasi untuk menghentikan perang yang berlarut-larut di Afghanistan. Dengan adanya kondisi tersebut, pada tahun 2011 hingga 2018 Indonesia melalui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia mengambil inisiatif sebagai aktor penengah antara pemerintah Afganistan dan pimpinan Taliban untuk menjalankan misi diplomatiknya kepada negeri sahabatnya yang sedang berkonflik melalui pendekatan agama. Dalam menjalankan misi ini, Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya pada saat itu yakni Hasan Wirayuda dan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) meminta kepada PBNU yang dipimpin oleh K.H As'ad Said Ali untuk menjalankan misi diplomatiknya dengan Afghanistan melalui pembicaraan dengan para ulama dan tokoh masyarakat di negara tersebut.¹⁶

Ditunjuknya PBNU sebagai mediator untuk menjalankan misi diplomatiknya ke Afghanistan dikarenakan PBNU dinilai mempunyai kapabilitas untuk mengadakan dan melakukan kegiatan di kancah internasional, hal tersebut dibuktikan dengan kegiatannya selama 10 tahun terakhir dengan mengadakan dan

¹⁵ Ibid, Hal 2.

¹⁶ Wawancara dengan K.H As'ad Said Ali, 24 Maret 2020 di Kantor Pribadi Tebet.

menghadiri konferensi internasional seperti *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS) yang dihadiri oleh 300 ulama dari 42 negara.¹⁷

Selain itu pada bulan Juli 2007, PBNU berhasil melakukan pembebasan sandera warga Korea Selatan di Afghanistan dari kelompok Taliban yang gagal dilakukan oleh komunitas internasional seperti ICRC, *Amnesty International*, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.¹⁸ PBNU berhasil membuka jalur untuk berdialog dengan pihak Taliban, sebagai organisasi keagamaan yang tidak memiliki kepentingan maupun berdampak atau terlibat dalam konflik di Afghanistan, PBNU dalam dialognya berhasil untuk membebaskan sandera berkewarganegaraan Korea Selatan yang ditahan oleh Taliban tanpa syarat.¹⁹

Afghanistan dan Indonesia memiliki beberapa kesamaan, salah satunya adalah merupakan negara yang mayoritasnya berpenduduk Muslim. Dalam menciptakan misi diplomatiknya untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan, PBNU berupaya untuk menggunakan pendekatan melalui agama dengan tokoh ulama sebagai mediator, hal tersebut dilakukan karena selama ini pembicaraan damai yang telah dilakukan oleh negara-negara lain sebelumnya masih menggunakan media antar negara sebagai penengah, di mana hal tersebut belum mendapatkan kepercayaan penuh dari pihak Afghanistan dan Taliban yang memperhitungkan mengenai kemungkinan adanya kepentingan yang dimanfaatkan oleh negara sebagai mediator tersebut. Forum perdamaian yang bersifat pertemuan informal dan *people-to-people* ini diharapkan sebagai langkah pertama untuk

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

membangun kepercayaan bagi pihak-pihak yang berkonflik sebelum membicarakan mengenai penyelesaian secara politis.²⁰

1.2.1 Pembatasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini dimulai sejak terjalannya Forum Silaturahmi Perdamaian pertama antara pihak Afghanistan yang terdiri dari sejumlah ulama dan tokoh pemuka agama dari Afghanistan pada tahun 2011 hingga 2018. Batas waktu tersebut dipilih karena pada tahun 2011 merupakan cikal bakal terjalannya komunikasi antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Indonesia dengan Afghanistan untuk melakukan dialog untuk masa depan perdamaian antara Afghanistan dan Taliban. Hingga tahun 2018 terdapat banyak forum atau agenda lainnya yang dilakukan oleh PBNU dan Afghanistan-Taliban untuk mencapai proses damai.

1.2.2 Perumusan Masalah

Setelah melakukan pertimbangan dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah diatas, maka inti dari penelitian yang akan dijawab oleh penulis adalah: **“Apa faktor yang membuat PBNU menjadi mediator dari resolusi konflik di Afghanistan?”**

²⁰ Ibid.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi mengenai faktor apa yang menjadikan PBNU sebagai mediator dalam mendorong terealisasinya perdamaian di Afghanistan atas konflik yang terjadi dengan Taliban. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan baru dalam menjalankan proses perdamaian konflik melalui sistem *people-to-people* yang diharapkan dapat memberikan alternatif dalam mencapai proses perdamaian di Afghanistan yang sebelumnya belum secara efektif dilakukan oleh komunitas internasional lainnya. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dipaparkan sebelumnya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor yang menjadikan PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dapat membuka jalan untuk berdialog mengenai konflik yang berlarut-larut di Afghanistan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui agenda yang dilakukan oleh PBNU melalui pendekatan agama dengan dialog antar ulama Afghanistan yang disertai dengan pihak Taliban sebagai pihak kunci dalam mencapai perdamaian atas konflik yang terjadi selama bertahun-tahun di Afghanistan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk topik lain yang berkaitan di masa yang akan datang.

1.4 Kajian Pustaka

Bagian ini memperlihatkan mengenai perdebatan yang dilakukan para akademisi terdahulu mengenai penyelesaian konflik di Afghanistan melalui kontribusi dari aktor non-negara dan upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Terkait dengan penanganan konflik di Afghanistan oleh aktor non-negara, terdapat dua pemikiran mengenai posisi para ahli dalam melihat mengenai penyelesaian konflik di Afghanistan, yakni pihak ahli yang memandang peranan aktor non-negara yang cukup efektif dalam membangun perdamaian pada konflik di Afghanistan dan pihak ahli yang memandang kurang efektifnya membangun perdamaian pada konflik Afghanistan yang dilakukan oleh aktor non-negara.

Semenjak tahun 1990 mulai muncul aktor non-negara yang mempunyai inisiatif dalam membangun perdamaian atau *peacebuilding* untuk menyebarkan nilai-nilai perdamaian ditengah jalannya konflik antara Afghanistan dengan Taliban. Sebelumnya, penyelesaian konflik di Afghanistan telah bertahun-tahun banyak mendapat bantuan yang dilakukan oleh beberapa pihak, peranan negara lain untuk menyediakan pembicaraan damai dengan pihak yang berkonflik pernah dilakukan oleh Amerika Serikat, Rusia, Organisasi Negara-negara Muslim/OIC, Uni Eropa, dan lain-lain. Menurut penelitian dari RAND *Corporation*, banyaknya aktor negara luar yang mengintervensi dinilai membuat dimensi konflik Afghanistan semakin rumit, karena adanya kepentingan masing-masing negara yang dapat bersinggungan baik dengan pihak lain ataupun dengan aktor yang

berkonflik dan minimnya persetujuan antara kedua belah pihak untuk melegitimasi pihak yang terlibat sebagai mediator.²¹

Nader dan Roberts menyatakan bahwa dengan menghubungkan antara aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintahan atau NGO telah menyumbang beberapa manfaat untuk menumbuhkan pembangunan perdamaian di skala lokal dalam mencapai perdamaian yang inklusif di Afghanistan.²² Selain dengan keterlibatan aktor negara dalam penyelesaian konflik di Afghanistan, terdapat beberapa perdebatan mengenai aktor non-negara yang dinilai memiliki kapabilitas tertentu dalam penyelesaian konflik. Dalam bagian penelitiannya kepada aktor non-negara yakni organisasi non-pemerintahan yang telah beroperasi di Afghanistan dalam membantu pembangunan perdamaian di negara tersebut, menekankan bahwa aktor non-negara memiliki kapasitas yang baik dalam mencapai keadilan dan menyelesaikan perselisihan konflik mengenai diferensiasi etnis yang merupakan salah satu pemicu konflik yang berlarut-larut di Afghanistan.²³

Sebagai tambahan, keterlibatan aktor agama memiliki fungsi kunci dalam menengahi konflik lokal, dalam penyelesaian konflik di Afghanistan keterlibatan ulama lokal baik yang berideologi Syiah dan Sunni dilakukan dalam beberapa aktivitas cukup baik untuk mencapai inklusivitas dalam penyelesaian konflik lokal di Afghanistan karena peranan ulama yang mempunyai kepercayaan yang tinggi

²¹ RAND Corporation, "Afghan Peace Talks." 2011, diakses pada 22 November 2020, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2011/RAND_MG1131.pdf Hal 17-65.

²² Jawed Nader dan Fleur Roberts, "Inclusive local peacebuilding in Afghanistan: Lesson from practice." Conciliation Resources, Accord Issue No. 27, diakses pada 30 November 2020, https://rc-services-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/18_Nader_Roberts_Incremental-Peace-in-Afghanistan-81-85.pdf

²³ Ibid, Hal 80.

dan dihargai oleh aktor yang berkonflik seperti Taliban, contoh lainnya adalah memperluas peranan perempuan dalam partisipasi sosial.²⁴ Mendukung mengenai peran ulama tersebut, hal yang sama dibahas juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Wardak, Zaman, dan Nawabi yang menyatakan bahwa dalam konflik Afghanistan dan Taliban, ulama memiliki kapasitas atau peran penting dalam memimpin arus pemerintahan atau pengambil keputusan oleh pihak-pihak yang berkonflik.²⁵ Seperti yang diungkapkan oleh Nader dan Roberts sebelumnya, aktor non-negara melibatkan ulama yang mempunyai peran penting untuk mencapai inklusivitas terhadap resolusi konflik antara Afghanistan dan Taliban. Bekerja dengan ulama sebagai salah satu cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh aktor yang mencoba untuk menyelesaikan konflik di Afghanistan merupakan salah satu kelebihan dari peranan aktor non-negara sebagai mediator dalam penyelesaian konflik di Afghanistan.

Hal tersebut didukung oleh riset dari *Initiative Mediation Support Deutschland*, salah satu keahlian dari aktor non-negara dalam penyelesaian konflik adalah memperkuat kompetensi mediator lokal dan memiliki kemampuan untuk cekatan dalam bertindak.²⁶ Selain dengan melibatkan peran aktor lokal, namun aktor non-negara mempunyai keahlian dalam akses yang lebih baik ke masyarakat

²⁴ Ibid.

²⁵ Mirwais Wardak, Idrees Zaman, dan Kanishka Nawabi, "The Role and Functions of Religious Civil Society in Afghanistan: Case study from Sayedbad & Kunduz." Research and Advocacy Departement Cooperation for Peace and Unity (CPAU) funded by Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Juli 2007, diakses pada 30 November 2020, <https://s3.amazonaws.com/berkley-center/070701CPAURoleFunctionReligiousCivilSocietyAfghanistan.pdf>

²⁶ Initiative Mediation Support Deutschland, "The Roles and Contributions of Multilateral and Non-State Actors in Peace Mediation: Fact Sheet Series: Peace Mediation and Mediation Support." Peace Mediation - Federal Foreign Office, Desember 2017, diakses pada 30 November <https://www.auswaertiges-amt.de/blob/1993534/fbc03decc03d573cec0d6fe8eddb4d9/roles-of-non-state-actors-in-peace-mediation-data.pdf>. Hal 2.

sipil, dengan lebih dekat pada masyarakat sipil dan merangkul aktor lokal kepercayaan dalam proses perdamaian lebih mudah untuk dicapai.²⁷ Dalam laporan yang dirilis oleh *Swiss Peace Center for Security Studies (CSS)*, aktor non-negara seperti NGO mempunyai karakteristik lebih baik dalam melakukan dialog informal dan memiliki resiko kapabilitas yang rendah atas kendala politik daripada pihak negara, sehingga dapat lebih mudah untuk memasuki konflik dan mendapat kepercayaan oleh pihak-pihak yang kontroversial dan cenderung sulit untuk dilibatkan berkomunikasi, seperti kelompok gerilyawan.²⁸

Berbeda dengan ahli sebelumnya, menurut Hofmann dan Schneckener dalam penelitiannya menyatakan bahwa satu-satunya keahlian yang dimiliki aktor non-negara dalam penyelesaian konflik adalah pengaruhnya terhadap opini publik, lokal, dan internasional.²⁹ Pada akhirnya aktor non-negara akan bergantung pada pendanaan dan sumber daya dari organisasi dan negara internasional apabila aktor tersebut terlibat dalam tekanan politik, hal tersebut menyebabkan keterlibatan aktor non-negara pada akhirnya dapat memungkinkan mengakibatkan adanya hubungan yang memburuk terhadap salah satu pihak yang berkonflik seperti aktor non-negara yang bersenjata dengan komunitas internasional.³⁰ Hal tersebut dibenarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Shea yang menyatakan bahwa aktor non-negara

²⁷ Ibid.

²⁸ Swiss Peace Centre for Security Studies (CSS), "Towards Realizing the Strengths and Mitigating the Challenges of NGO Mediators." Final Report of Consultation Process Mediation Support Project, Februari 2009, diakses pada 30 November 2020, <https://mediacionesjusticia.files.wordpress.com/2013/04/ngo-mediators-final-report-political.pdf>. Hal 5.

²⁹ Claudia Hofmann dan Ulrich Schneckener, "Engaging non-state armed actors in state and peace-building: options and strategies." *International Review of the Red Cross*, Vol. 93, No. 883, September 2011, diakses pada 30 November 2020, <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28824.pdf>. Hal 619.

³⁰ Ibid.

memiliki kekurangan kapabilitas dalam melakukan aktivitas diplomatis sehingga rentan terhadap adanya ketidakefektifan karena minimnya kekuasaan yang dimiliki.³¹

Berdasarkan oleh pemaparan literatur terdahulu, penanganan konflik di Afghanistan oleh aktor non-negara masih mengalami perdebatan diantara para ahli atau akademisi sehingga hal tersebut membuat penelitian ini dapat dilaksanakan. Dalam tulisan ini, penulis ingin mengatakan bahwa aktor non-negara yakni organisasi keagamaan sebagai aktor berbasis keyakinan/*faith-based organization* yang melibatkan peran khusus dari aktor keagamaan bisa memainkan peranan sebagai mediator dalam proses resolusi konflik. Dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang penulis ajukan, namun penelitian terdahulu tersebut dapat penulis jadikan acuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang penulis ajukan dengan metode kualitatif.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pada bagian kerangka pemikiran ini, penulis akan terlebih dahulu memaparkan mengenai teori, konsep, maupun pendekatan yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis dan menjelaskan definisi dari kata konflik. Dalam meneliti masalah yang penulis ajukan mengenai peran PBNU sebagai organisasi Islam di Indonesia untuk mencapai perdamaian atas konflik yang terjadi di

³¹ Nathan Shea, "Nongovernment Organizations as Mediators: Making Peace in Aceh, Indonesia." *Global Change, Peace & Security*, 28:2, 177-196, 6 April 2016, diakses pada 30 November 2020, <https://doi.org/10.1080/14781158.2016.1162778>. Hal 195.

Afghanistan, penulis akan menggunakan konsep peran agama dalam resolusi konflik oleh aktor berbasis keyakinan/*faith-based actor*, dan konsep resolusi konflik milik James A. Schellenberg.

Konflik didefinisikan sebagai perjuangan atas nilai-nilai dan klaim untuk sebuah status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka.³² Konflik juga bisa didasari oleh adanya norma-norma yang terlalu kaku untuk mengatur suatu hal untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan baru, hal tersebut menimbulkan adanya rasa kebencian yang dapat digunakan sebagai mobilisasi oleh suatu kelompok tertentu yang tidak puas akan *status quo* yang ada.³³ Dengan adanya situasi konflik tersebut mendorong adanya kekerasan untuk mendominasi dalam memperebutkan suatu kekuasaan sebagai prestise atau hal-hal material lainnya.³⁴

Penyelesaian konflik merupakan fokus utama dalam studi konflik, menurut James A. Schellenberg secara umum resolusi konflik mempunyai makna sebagai upaya pengurangan secara nyata dalam sebuah konflik sosial.³⁵ Dalam definisi yang luas, resolusi konflik dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan sebagai proses penyelesaian masalah secara sadar antara pihak-pihak yang berkonflik, baik itu menggunakan pihak ketiga, adanya perubahan atau pengaruh lingkungan, ataupun kemenangan dari salah satu pihak.³⁶

³² Kenneth E. Boulding, *Conflict and Defense*, 1962, New York: Harper and Row. Hal 5.

³³ Raymond W. Mack and Richard C. Snyder, "The Analysis of Social Conflict—toward an Overview and Synthesis," *Conflict Resolution* 1, no. 2 (1957): pp. 212-248, <https://doi.org/10.1177/002200275700100208>.

³⁴ Ho-Won Jeong, *Understanding Conflict and Conflict Analysis*, Los Angeles: Sage, 2011, Hal 5.

³⁵ James A. Schellenberg, *Conflict Resolution: Theory, Research, and Practice*.

Winnipeg:Manitoba Education and Advanced Learning, Alternate Formats Library, 2014. Hal 9.

³⁶ Ibid.

Salah satu mekanisme dalam menyelesaikan konflik adalah dengan melibatkan mediasi dengan pihak ketiga. Mediasi dengan pihak ketiga atau biasa disebut sebagai *third party mediation* merupakan upaya dari pihak luar yang berkonflik dimana pihak yang berselisih mencari bantuan, atau menerima bantuan dari individu, kelompok, negara, ataupun organisasi tanpa menggunakan tindakan memaksa ataupun dengan menggunakan otoritas hukum sebagai upaya untuk mengubah persepsi atau perilaku pihak-pihak yang berkonflik.³⁷ Dalam resolusi konflik pihak yang menjalankan mediasi disebut dengan mediator. Definisi mediator merupakan pihak luar yang mempunyai pengetahuan dan menawarkan solusi untuk membangun interaksi seperti berkomunikasi dalam kelompok, dengan tujuan untuk mengubah persepsi dari para pihak, mengelola perselisihan dalam batas tertentu dengan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki pihak mediator.³⁸

Resolusi konflik untuk mencapai perdamaian dapat dilakukan dengan kekuatan agama.³⁹ Pendekatan pada konflik melalui agama dilakukan dengan cara membangun perdamaian dengan mempertimbangkan tradisi agama-budaya yang terlibat di masyarakat, agama dapat menjadi sumber konflik sekaligus sebagai sumber penyelesaiannya, membawa nilai-nilai religius seperti sosial, moral, dan spiritual ke dalam proses pembentukan perdamaian dapat menciptakan adanya komitmen baik untuk mengubah hubungan yang konfliktual menjadi hubungan

³⁷ Jacob Bercovitch and Jeffrey Z. Rubin, *Mediation in International Relations: Multiple Approaches to Conflict Management* (Basingstoke: Macmillan, 1992).

³⁸ Ibid, Hal 3.

³⁹ S. Ayse Kadayifci-Orellana, "Ethno-Religious Conflicts: Exploring the Role of Religion in Conflict Resolution," *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*, n.d., pp. 264-284, diakses pada 1 Desember 2020, <https://doi.org/10.4135/9780857024701.n15>.

yang damai untuk membawa legitimasi pada proses rekonsiliasi dalam memulai berinteraksi dengan pihak lawan.⁴⁰

Terdapat peran khusus yang bisa dilakukan oleh pemimpin agama untuk menyelesaikan konflik yang didasari oleh suku dan agama yang diidentifikasi sebagai advokasi, mediasi, observasi, pendidikan, dan melakukan dialog antar-agama.⁴¹ Berdasarkan konsep peran agama dalam resolusi konflik oleh aktor berbasis keyakinan/*faith-based actor* menurut Kadayifci, terdapat peran potensial bagi aktor berbasis keyakinan yakni yang menggunakan kekuatan agama terhadap sebuah resolusi konflik. Pertama, pemimpin agama atau pihak ketiga sebagai mediator harus mempunyai legitimasi dan kredibilitas untuk berkomitmen terhadap menyelesaikan konflik agar terbentuknya kepercayaan dalam mengubah sikap dan perilaku pihak yang berkonflik.⁴² Pemimpin agama merupakan salah satu aktor yang memiliki legitimasi dan kredibilitas yang besar dalam suatu komunitas dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat.⁴³

Kedua, adanya peran potensial bagi aktor berbasis keyakinan berupa tersedianya finansial, kelembagaan, dan sumber daya manusia saat dijalankannya proses penyelesaian konflik. Hal ini diperlukan sebagai komitmen dan dukungan dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan.⁴⁴ Dalam resolusi konflik yang berdasarkan motivasi agama oleh aktor berbasis keyakinan, terdapat beberapa karakteristik dalam prosesnya. Pertama, adanya identitas spiritual yang berbentuk

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid, Hal 16.

⁴² Ibid, Hal 17.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid, Hal 18.

keyakinan dan nilai-nilai agama untuk menumbuhkan keterikatan antara pihak yang berkonflik seperti keadilan, empati, kasih sayang yang dilakukan selama proses dialog rekonsiliasi.⁴⁵ Hal tersebut juga dapat membantu bagi para pihak yang berkonflik sebagai proses penyembuhan atas konflik yang terjadi.

Kedua, pendekatan resolusi konflik yang dilakukan dengan membawa teks sakral yang berasal dari ayat-ayat Kitab Suci, hal ini dilakukan sebagai langkah bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk mendengarkan lawan dengan pikiran dan hati yang terbuka.⁴⁶ Terakhir, pendekatan resolusi konflik oleh aktor berbasis keyakinan dilakukan dengan memulai ritual keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa keterhubungan dengan mewujudkannya dalam tindakan simbolik sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi kepada pihak terkait yang berkonflik.⁴⁷

Dalam mencapai perdamaian, resolusi konflik dapat diketahui sebagai metode untuk memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai yang dilakukan oleh kelompok yang berkonflik, dimulai dengan mengkomunikasikan mengenai motif atau alasan ataupun ideologi yang bertentangan yang dibicarakan dalam sebuah negoisasi.⁴⁸ Aktor yang menggunakan pendekatan resolusi konflik yang menggunakan kekuatan agama salah satunya disebut dengan *Faith-based Organization*. Menurut UNDP, menyatakan bahwa organisasi yang mendapat inspirasi dan bimbingan di setiap kegiatannya atas ajaran atau interpretasi tertentu melalui asas keimanan. Dalam menjalankan perannya, suatu aktor harus memiliki legitimasi dan kredibilitas untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak lain untuk

⁴⁵ Ibid, Hal 15.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Donelson R. Forsyth, *Group Dynamics*, (Pacific Grove, CA: Brooks/Cole, 1983).

dapat menjadi aktor yang terpercaya dalam melaksanakan suatu tugas atau aktivitas. Legitimasi mengacu pada keyakinan normatif oleh seorang aktor bahwa suatu aturan atau institusi harus ditaati.⁴⁹ Persepsi sang aktor dapat berasal dari substansi aturan atau dari prosedur atau sumber yang dengannya aturan itu dibuat.⁵⁰ Legitimasi tersebut pun mewakili sebuah tindakan.⁵¹ Sedangkan kredibilitas mengacu kepada kualitas yang dirasakan dari satu sumber yang kemudian menghasilkan perilaku percaya, sehingga kredibilitas identik dengan kepercayaan. Kredibilitas dilihat dari keahlian, kepercayaan, dan niat baik.⁵² Selanjutnya, kapabilitas memiliki arti sumber daya material dan non-materi yang dapat menjadi dasar untuk kekuasaan.⁵³ Pentingnya kapabilitas disebabkan dapat membuat kemungkinan untuk sebuah aktor negara dan non-negara memiliki pengaruh dalam hubungan internasional untuk berhubungan dengan aktor negara dan non-negara lainnya.⁵⁴

⁴⁹ Ian Hurd, "Legitimacy and Authority in International Politics." *International Organization* 53, no. 2 (1999): 379-408. Diakses pada 13 Januari, 2021. <http://www.jstor.org/stable/2601393>, Hal 381

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ C.A Thomas, "The Concept of Legitimacy and International Law." LSE Law, Society, and Economy Working Papers 12/2013 London School of Economics and Political Science Law Departement." Diakses pada 12 Januari 2021, http://eprints.lse.ac.uk/51746/1/libfile_repository_Content_Law,%20society%20and%20economics%20working%20papers_2013_WPS2013-12_Thomas.pdf, Hal 17. Definisi dari buku Rodney S Barker, *Legitimizing Identities: The Self-Presentations of Rulers and Subjects* (2001).

⁵² James C. McCroskey dan Jason J. Teven, "Goodwill: A reexamination of the construct and its measurement." *Communication Monographs*, 66(1), 90–103, diakses pada 12 Januari 2021, <https://doi.org/10.1080/03637759909376464>, Hal 90. Dilansir dari jurnal L. Hellmueller dan D. Trilling, "The credibility of credibility measures: a meta-analysis in leading communication journals, 1951 to 2011.", WAPOR Hong Kong 2012: paper presentation World Association for Public Opinion Research/Public Opinion Programme, The University of Hong Kong. Diakses pada 12 Januari 2021, <http://wapor2012.hkpop.hk/doc/papers/ConcurrentSessionsV/VD/VD-3.pdf>

⁵³ Mark V. Kauppi and Paul R. Viotti, *International Relations Theory* (Lanham; Boulder; New York; London: Rowman et Littlefield, 2013). Hal 191.

⁵⁴ Ibid.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah penulis ajukan, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif yakni salah satu metode penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui dokumen, observasi perilaku, atau dengan wawancara oleh partisipan.⁵⁵ Dalam melakukan penelitian dengan wawancara oleh partisipan, untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan mencatat informasi wawancara yang dilakukan berupa rekaman audio, tulisan tangan, ataupun rekaman video yang selanjutnya akan di transkripsi.⁵⁶ Penelitian dengan metode kualitatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pemahaman terhadap suatu kasus sosial.⁵⁷

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada atau analisis data yang dikumpulkan oleh orang lain.⁵⁸ Secara spesifik, data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya dan dapat menjadi

⁵⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Erscheinungsort nicht ermittelbar: SAGE Publications Ltd., 2013). Hal 250.

⁵⁶ Ibid, Hal 20.

⁵⁷ Bruce L. Berg and Howard Lune, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, (Harlow: Pearson Education, 2014). Hal 3.

⁵⁸ Sarah Boslaugh, "An Introduction to Secondary Data Analysis," *Secondary Data Sources for Public Health*, n.d., pp. 1-11, <https://doi.org/10.1017/cbo9780511618802.002>. Hal 2-10.

pertimbangan untuk digunakan kembali terhadap pernyataan penelitian yang baru.⁵⁹

Maka dari itu penulis akan menggunakan buku, jurnal, dan situs resmi dari lembaga untuk digunakan sebagai referensi yang dipilih oleh penulis agar sesuai dengan penelitian yang diajukan. Penulis juga akan menggunakan teknik wawancara kualitatif dalam pengumpulan data dengan melakukan wawancara tatap muka oleh partisipan dan menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan untuk memperoleh pandangan dan pendapat dari partisipan.⁶⁰ Wawancara yang akan dilakukan oleh penulis tersebut kemudian akan di konversi dari bentuk audio kedalam bentuk naratif.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab I – Pendahuluan Penelitian ini akan penulis bagi ke dalam empat bab. Bab I merupakan garis besar mengenai rancangan penelitian yang dibahas dalam beberapa bagian. Pertama, bagian latar belakang masalah berisi atas pemahaman awal atas konflik yang akan penulis teliti, pemahaman secara mendalam dilanjutkan pada bagian identifikasi masalah, pembahasan masalah, dan perumusan masalah yang berisi pertanyaan penelitian yang penulis ajukan yakni “Apa faktor yang membuat PBNU menjadi mediator dari resolusi konflik di Afghanistan” penulis akan melanjutkan ke bagian tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran yang menggunakan konsep peran agama dalam resolusi konflik oleh aktor berbasis keyakinan/*faith-based actor* dan konsep resolusi konflik

⁵⁹ Thomas P. Vartanian, *Secondary Data Analysis* (New York: Oxford University Press, 2011).

⁶⁰ *Ibid*, John W. Creswell Hal 298.

milik James A. Schellenberg, metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dari buku, artikel, jurnal, dan wawancara dari organisasi PBNU ataupun laporan yang dipublikasikan secara daring, terakhir penulis akan membahas mengenai sistematika pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini.

Bab II – akan berisikan mengenai pembahasan secara deskriptif mengenai mengenai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Islam PBNU terhadap proses pencapaian damai pada konflik di Afghanistan.

Bab III – dalam bab ini penulis akan menganalisis menggunakan kerangka pemikiran yang telah penulis ajukan yakni konsep peran agama dalam resolusi konflik oleh aktor berbasis keyakinan/*faith-based actor* dan teori resolusi konflik milik James A. Schellenberg mengenai upaya organisasi Islam PBNU yang berperan sebagai pihak ketiga untuk mediasi mengenai tercapainya perdamaian konflik di Afghanistan.

Bab IV – akan memaparkan kesimpulan berupa hasil penelitian dari skripsi ini mengenai faktor-faktor bagi PBNU sebagai organisasi Islam Indonesia yang menjadi pihak ketiga dalam mencapai perdamaian atas konflik di Afghanistan.